

## DAFTAR PUSTAKA

- Bailey, William. G.,  
2005                     *"Ensiklopedia Ilmu Kepolisian"*, YPKIK, Jakarta.
- Baringbing, RE,  
2001                     *"Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum"*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Brigjen Pol. H. Hadiman,  
1987                     *"Kamus Istilah Polri"*, Mabes Polri, Jakarta.
- Brotodiredjo, Soebroto,  
1997                     *"Pengantar Hukum Kepolisian Umum Di Indonesia"*, Yuseha, Bandung.
- Dharmawan, Allan Satya,  
2007                     *"Pengungkapan Jaringan Kejahatan Narkoba Oleh Direktorat Narkoba Polda Jabar"*, Tesis, KIK-UI, Jakarta.
- Eka.C.R, Dhian,  
2004                     *"Implementasi Pasal 56 KUHAP Dalam Proses Penyidikan Di Polres Deli Serdang"*, Skripsi Un.Panca Budi, Medan.
- Harahap. M. Yahya,  
2003                     *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hart, H.L.A.,  
1961                     *"Concept of Law"*, Oxford University Press, Oxford.
- Kansil, C.S.T,  
1983                     *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Karjadi.M.,  
1975                     *"Himpunan Undang-Undang Terpenting bagi Penegak Hukum"*, Politea, PT. Karya Nusantara Cab. Bandung, Bogor.
- Kelana, Momo,  
2002                     *"Memahami Undang-Undang Kepolisian, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal"*, Jakarta, PTIK "Press".
- Kunarto, ed.,  
2001                     *"Perilaku Organisasi Polri"*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta.
- LAN.RI  
2003                     Sistem Administrasi NKRI (SANKRI), Jakarta,

Mustopadidjaja, AR, 2002	<i>"Manajemen Proses Kebijakan Publik"</i> , LAN, Jakarta.
Qadir.C.A., 1995	<i>"Ilmu Pengetahuan dan Metodenya"</i> , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Saile, Said., dkk. 2006	<i>"Himpunan Teori/ Pendapat Para Sarjana Yang Berkaitan Dengan Tugas Kepolisian"</i> , PTIK, Jakarta.
Santoso, Topo, 2002	<i>"Kriminologi"</i> , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
Sampford, Charles, 1989	<i>The Dis-order of Law, a critique of legal theory</i> , Basil Blackwell.
Soekanto, Soerjono, 2002	<i>"Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum"</i> , PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
----- 2004	<i>"Pokok-Pokok Sosiologi Hukum"</i> , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sunarto, Kamanto, 2000	<i>"Pengantar Sosiologi"</i> , Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Suparlan, Parsudi, 1997	<i>"Metode Penelitian Kualitatif"</i> , PPSUI, Jakarta,
----- 2004	<i>"Hubungan Antar Suku Bangsa"</i> , YPKIK, Jakarta,
----- 2007	<i>"Jurnal Polisi Indonesia"</i> , ed. X/ September, "Kode Etik Untuk Menunjang Profesionalisme Polisi", Padma Studio, Jakarta.
Susanto, Anthon Freddy, 2005	<i>"Semiotika Hukum, dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna"</i> , PT. Refika Aditama, Bandung.
Tim Penulis PTIK, 2007	<i>"Potret Diri dan Arah Pengembangan Polri Dalam Konteks Reformasi"</i> , PTIK Press, Jakarta.

### **Artikel dan Makalah:**

“Diskresi Kepolisian”, Dr. Jusuf. MM, dkk, KIK.UI, Jakarta.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi>, Jakarta, Rabu, 13 Februari 2008.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>, Jakarta, Rabu, 13 Februari 2008.

### **Peraturan Perundangan :**

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: SKEP/ 1205/ IX/ 2000 tentang Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Petunjuk Teknis No.Pol.: JUKNIS/ 16/ VII/ 1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Petunjuk Teknis No.Pol.: JUKNIS/ 17/ VII/ 1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Petunjuk Pelaksanaan No.Pol.: JUKLAK/ 37/ VII/ 1991 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/ 7/ I/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri.